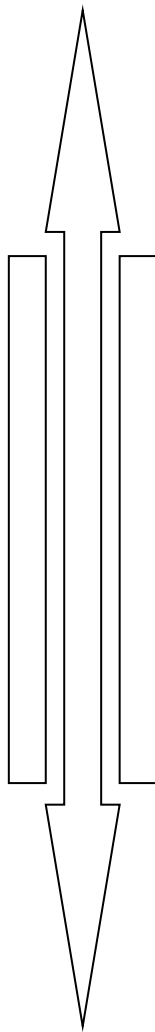




**RENCANA KERJA
KECAMATAN PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026. Dimana dalam dokumen Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 dirinci program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan (2022).

Kebumen, 10 September 2021

CAMAT PONCOWARNO,
Drs. ANTON PURWANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19751024 199602 1 002

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONCOWARNO TAHUN 2020	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra sampai Tahun 2020	5
2.2 Kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Poncowarno	20
2.4 Review Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	34
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	34
3.3 Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	42
A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten	40
B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022	41
BAB V PENUTUP	48
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno Tahun 2020	6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno dan Pencapaian Renstra Kecamatan Poncowarno s/d Tahun 2020	8
Tabel 2.3	Resume Ketercapaian Program Kecamatan Poncowarno Tahun 2020	12
Tabel 2.4	Refocusing Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2021.....	13
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	20
Tabel 2.6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Kebumen	24
Tabel 2.7	Usulan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 sebagai usulan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu Tahun 2022	31
Tabel 2.8	Daftar Usulan Prioritas Desa yang akan Diusulkan ke Perangkat Daerah Kecamatan Poncowarno Tahun 2022	32
Tabel 3.9	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Poncowarno	35
Tabel 3.10	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Poncowarno Tahun 2022	38
Tabel 3.11	IKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026	39
Tabel 4.12	Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten	41
Tabel 4.13	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Serta Prakiraan Maju Kecamatan Poncowarno Tahun 2022	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (P1) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Poncowarno
Lampiran 2	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Lampiran 3	Terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">– Berita Acara Musrenbangcam Tahun 2020 beserta lampirannya– Daftar Hadir Musrenbangcam Tahun 2020– Dokumentasi Pelaksanaan Musrenbangcam Tahun 2020– Notulen Musrenbangcam Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Poncowarno sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan dari Renstra. Kecamatan Poncowarno berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tata cara penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 juga mengacu kepada rancangan awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022, Renja SKPD digunakan sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu : *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri Berakhlak Bersama Rakyat”*. Kemudian Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Poncowarno adalah Misi ke-1 (satu) yaitu: *“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi”*.

Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 dengan dokumen Renstra Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Poncowarno tahun sebelumnya (2021).

1.4 Sistematika Penyusunan

Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penulisan
- Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020.
 - B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - C. Capaian Keuangan
 - D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
 - F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - A. Telaah terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
 - B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - C. Program dan Kegiatan
- Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
 - B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V. Penutup
 - A. Catatan Penting
 - B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
 - C. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONCOWARNO TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sampai Tahun 2020

Rencana Kerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 disusun berdasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Poncowarno saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Renja Kecamatan Poncowarno tahun lalu, yaitu Tahun 2020 dievaluasi sebagaimana juga amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Ketercapaian program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2020 dapat dilihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2020. Pada Tabel 2.1 berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno dan pencapaian Renstra Kecamatan Poncowarno sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno Tahun 2020

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
		4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
		7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
		10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		11.	Penyediaan Makanan dan Minuman
		12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
		13.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.	Pengadaan Mebeleur
		15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
		16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
		17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		18.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
		19.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3.	Program Pengembangan Data/ Informasi	20.	Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
4.	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	21.	Penyusunan Database dan Profil Desa/ Kecamatan

5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	22.	PengendPoncowarno Keamanan Lingkungan
6.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	23.	Fasilitasi TKP2KDes/Kel
7.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	24.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
		25.	Pembinaan Sosial Masyarakat
8.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	26.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
9.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	27.	Fasilitasi APBDes
		28.	Fasilitasi Program Pembangunan
10.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	29.	Pembinaan PKK
11.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendPoncowarno Pelaksanaan Kebijakan KDH	30.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
12.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	31.	Penyelenggaraan Musrenbangcam
		32.	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)

Tabel di atas menunjukkan pada Tahun 2020 di Kecamatan Poncowarno melaksanakan 12 Program dan 32 Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut masih menggunakan nomenklatur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2016-2021 sampai Tahun 2021 adalah sebagaimana Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Poncowarno s/d Tahun 2021

Nama OPD : Kecamatan Poncowarno

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec. Poncowarno) s/d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7			Unsur Kewilayahan								
7	01		KECAMATAN								
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7	01	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun							
7	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	30 dokumen	20 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	30 dokumen	100
7	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	12 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	12 dokumen	100
7	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah							
7	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	72 bulan	48 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100
7	01	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	72 bulan	48 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100

1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah								
7	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (kabel, lampu, terminal, saklar)	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100
7	01	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100
7	01	01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100
7	01	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100
7	01	01	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bulan penyediaan bahan / material	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100
7	01	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100
7	01	01	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
7	01	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/ operasional	4 unit	4 unit	-	-	-	-	4 unit	100
7	01	01	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	80 unit	60 unit	20 unit	20 unit	100	-	80 unit	100
7	01	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor	6 unit	5 unit	-	-	-	1 unit	6 unit	100
7	01	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	1 unit	1 unit	-	-	-	-	1 unit	100
7	01	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah								
7	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100
7	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100

1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100
7	01	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah								
7	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100
7	01	01	Pemeliharaan Meubel	Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala meubelair	60 unit	48 unit	-	-	-	12 unit	60 unit	100
7	01	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin / pemeliharaan peralatan perbaikan kerja	60 unit	40 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	60 unit	100
7	01	01	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6 unit	4 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	6 unit	100
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik								
7	01	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat								
7	01	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah								
7	01	05	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Hari Jadi Kebumen dan HUT RI								

1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	05	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	12 kegiatan	8 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	12 kegiatan	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								
7	01	06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan								
7	01	06	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	66 desa	44 desa	11 desa	11 desa	100	11 desa	66 desa	100
7	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	11 desa	11 desa	-	-	-	-	11 desa	100
7	01	06	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	11 desa	11 desa	-	-	-	-	11 desa	100
7	01	06	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	18 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	18 dokumen	100
7	01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	198 orang	132 orang	33 orang	33 orang	100	33 orang	198 orang	100

1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	06	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	12 kegiatan	8 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	12 kegiatan	100
			Peningkatan Perekonomian Berbasis Pengembangan Wilayah (Kuota Kecamatan)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi perdesaan Desa Tegalrejo, Desa Kedungdowo dan Desa Jembangan	3 desa	3 desa	-	-	-	-	3 desa	100
7	01	06	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pem berdayaan masyarakat desa (pembinaan BUMDes, UKS, PKK dan Sosmasy)	66 desa	44 desa	11 desa	11 desa	100	11 desa	66 desa	100
				Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan	72 orang	36 orang	-	-	-	36 orang	72 orang	100
				Jumlah Pembinaan Sosial Masyarakat	24 kelompok	13 kelompok	-	-	-	11 kelompok	24 kelompok	100
7	01	06	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes dan Sembako)	66 desa	44 desa	11 desa	11 desa	100	11 desa	66 desa	100

Tabel 2.3
Resume Ketercapaian Program Kecamatan Poncowarno Tahun 2020

No	Nama Program	Indikator Program	Capaian s.d 2020
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	91,29%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	99,89%
3	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya dokumen perencanaan	95,42%
4	Program Pengembangan Data/Informasi/Satistik daerah	Tersedianya dokumen data base dan profil desa	100%
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya kegiatan TKP2KDes	98,07%
6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terfasilitasinya kegiatan organisasi kepemudaan dan Peringatan Hari Besar Islam	93,65%
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI	42,77%
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	98,13%
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat partisipasi petugas linmas dalam pengendalian keamanan lingkungan	98,74%
10	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Terlaksananya pembinaan administrasi PKK	92,37%
11	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terselenggaranya fasilitasi PATEN	98,61%
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana kerja pembangunan Kecamatan Poncowarno	98,13%
	Rata – rata		95,09%

Sumber : Kec. Poncowarno, data diolah 2020

Di Kecamatan Poncowarno tidak menganggarkan anggaran secara khusus untuk penanganan Covid-19, namun dengan adanya jumlah kasus aktif Covid-19 di wilayah Kecamatan Poncowarno yang semakin meningkat dilakukan refocusing sebesar Rp. 25.464.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai :

Tabel 2.4.
Refocusing Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran sebelum Refocusing (Rp)	Pagu Anggaran setelah Refocusing (Rp)	Bertambah/ Kurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.764.047.000	1.755.043.000	9.004.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000	10.500.000	0
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	0
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	4.500.000	0
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.608.001.000	1.608.001.000	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.583.511.000	1.583.511.000	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000	5.000.000	0
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	19.490.000	19.490.000	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.669.000	37.669.000	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.890.000	1.890.000	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	12.000.000	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.533.000	7.533.000	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.166.000	2.166.000	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	10.080.000	10.080.000	0
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	4.000.000	0
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000	14.265.000	7.735.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran sebelum Refocusing (Rp)	Pagu Anggaran setelah Refocusing (Rp)	Bertambah/ Kurang
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000	14.265.000	7.735.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	14.265.000	7.735.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.877.000	52.877.000	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.877.000	1.877.000	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000	33.000.000	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	18.000.000	0
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.000.000	31.731.000	1.269.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	25.000.000	0
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	0
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	3.731.000	1.269.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	57.250.000	57.250.000	0
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	57.250.000	57.250.000	0
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.575.000	2.575.000	0
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	54.675.000	54.675.000	0
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	25.464.000	25.464.000
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	25.464.000	25.464.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran sebelum Refocusing (Rp)	Pagu Anggaran setelah Refocusing (Rp)	Bertambah/ Kurang
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	25.464.000	25.464.000
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.751.000	5.291.000	16.460.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.751.000	5.291.000	16.460.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.751.000	5.291.000	16.460.000
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.643.000	91.643.000	0
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.643.000	91.643.000	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.860.000	16.860.000	0
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.160.000	8.160.000	0
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.760.000	9.760.000	0
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	20.000.000	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran sebelum Refocusing (Rp)	Pagu Anggaran setelah Refocusing (Rp)	Bertambah/ Kurang
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	31.863.000	31.863.000	0
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000	5.000.000	0
	JUMLAH	1.934.691.000	1.934.691.000	0

Refocusing Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 masuk dalam kegiatan baru yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran Rp. 25.464.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Capaiannya yaitu terciptanya hubungan yang sinergis dengan aparatur dan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Poncowarno, hasil capaiannya yaitu terkoordinasinya penanganan Covid-19 dan sasaran kegiatannya adalah warga masyarakat Kecamatan Poncowarno, aparat dan lintas sektor. Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD ini adalah penyesuaian penggunaan anggaran kegiatan dana alokasi umum Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Covid-19.

2.2 Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa fungsi dari kecamatan sebagai berikut:

- penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat, kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Poncowarno, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Poncowarno dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
- 2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
- 3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada dinas instansi yang berada di wilayah kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 4. Pelayanan kepada pemerintahan desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno Tahun 2020 dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno
Kabupaten Kebumen

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	-	-	100	100			100	100			
2	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	-	-	83,73	85,00			84,00	86,52			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Poncowarno	-	-			87,00	88,00			88,00	89,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Poncowarno

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno sampai dengan Tahun 2021 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya persentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Poncowarno, yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelayanan pada masyarakat khususnya penyandang difabel dan sarpras yang mendukung kinerja pelayanan PATEN karena di Kecamatan Poncowarno pelayanannya mencakup sampai ke kecamatan lain,
2. Belum optimalnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi. Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sampai Tahun 2021, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Kebumen masih belum berjalan optimal sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi yang lebih.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat Poncowarno dilihat dari indikator kemiskinan di angka 10 dari 26 kecamatan, angka melek huruf 100%, kematian bayi 0%, dan kematian ibu hamil 0%.
4. Dengan kondisi geografis dan latar belakang kesejahteraan di Kecamatan Poncowarno menjadikan tantangan yang baru yakni perlu penciptaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kemandirian sosial ekonomi masyarakat agar tidak masuk dalam desil I dan II sehingga diperlukan peluang-peluang untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahlian penduduk Kecamatan Poncowarno. Dengan kondisi demografi serta geografi Kecamatan Poncowarno yang rata-rata penduduk ada pada kategori produktif maka peluang untuk mendapatkan SDM yang tangguh sangat berat.
5. Sektor pertanian menjadi isu utama dalam pembangunan. Luas wilayahnya Kecamatan Poncowarno 2.683,58 km², dengan jumlah penduduknya 18.991 jiwa yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, dan buruh tani, dengan lahan pertanian seluas 1.554 Ha, penggunaan lahan sebagian besar digunakan sebagai permukiman dan lahan pertanian sawah berupa padi dan lahan pertanian palawija jika di musim kemarau. Panen padi di wilayah ini bisa panen 2-3 kali dalam setahun karena umumnya sawah di Kecamatan Poncowarno dilintasi jaringan irigasi dari Waduk Wadaslintang serta daerah irigasi (DI) bendung sungai di sekitarnya.
6. Peran kecamatan dalam pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di desa, yaitu :
 - a. Terlibat dalam percepatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak, terutama bagi desa yang belum mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.

- b. Memberikan asistensi proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APBDesa bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
- c. Menerima pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari bupati/wali kota, kewenangan dalam melakukan dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui APBDesa.
- e. Menerima laporan rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di setiap desa, disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kebijakan teknis untuk penyelamatan warga dari ancaman Covid-19 antara lain :

- a. Menyediakan isolasi terpusat tingkat Kecamatan Poncowarno yang bertempat di Rumah Dinas Camat Poncowarno kompleks Kantor Kecamatan Poncowarno.
 - b. Mensosialisasikan dan mengedukasi secara mandiri bagi keluarga yang salah satunya ada yang terpapar Covid-19.
 - c. Koordinasi dengan Dinas BPBD dan RSUD Kabupaten Kebumen apabila ada warga yang meninggal terpapar Covid-19.
 - d. Sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan.
 - e. Mensosialisasikan pemberian vaksin kepada masyarakat untuk wilayah Kecamatan Poncowarno.
 - f. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait dengan Covid-19.
 - g. Melaporkan perkembangan Covid-19 ke Satgas Kabupaten Kebumen.
7. Pelaksanaan pemutakhiran IDM berbasis *Sustainable Development Goals* (SDG's) di Kecamatan Poncowarno sudah dilaksanakan pada Tahun 2021 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 11 desa di Kecamatan Poncowarno, sedangkan input ke aplikasi SDG's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SDG's sudah dilakukan di 11 desa. Kendala :
- a. Aplikasi yang eror/trobel sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
 - b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
8. Strategi dalam pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah di bagi menjadi dua bagian, pertama melindungi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi dan upaya tersebut selanjutnya dituangkan dalam beberapa program yang diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan bahan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Upaya pemerintah memiliki beberapa sistem yaitu perlindungan sosial, identifikasi dan penilaian penerima manfaat melalui program data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan dalam mengurangi dampak sosial ekonomi di masa pandemi, program keluarga harapan (PKH), memperluas cakupan program sembako serta menyalurkan program bantuan tunai maupun BLT yang bersumber dari Dana Desa.

9. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Sehingga, Bumdes sebagai lembaga ekonomi rakyat yang juga menjadi pilar demokrasi. Bumdes yang diciptakan dengan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan Bumdes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri. BUM Desa sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha Di Kecamatan Poncowarno sampai dengan Tahun 2021 terdapat 3 (tiga) unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mulai aktif dan berkembang yakni, 1) BUMDes Tegalrejo dengan bentuk usahanya perbengkelan, kios pertanian dan pengelolaan pasar desa; 2) BUMDes Tirtomoyo dengan bentuk usaha pengelola Wisata Alam Prabu (WAP) dan pengelola air minum isi ulang Prabu; dan 3) BUMDes Poncowarno dengan bentuk usaha pengelola Pertashop dan percetakan.
10. Permasalahan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dan DD mayoritas desa masih mengalami keterlambatan pada setiap pelaporannya. Upaya yang dilakukan adalah mengenai redaksi penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dengan melakukan pembinaan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, dan bimbingan teknis proses penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD dan DD agar tepat waktu dan akuntabel. Namun secara umum pelaksanaan ADD dan DD di Kecamatan Poncowarno tidak ada permasalahan.

2.4 Review Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kecamatan Poncowarno dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Renja tersebut memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang mana merupakan tolok ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen. Dokumen tersebut juga mengandung informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Poncowarno.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020, terdapat perubahan dalam nomenklatur sehingga Kecamatan Poncowarno mengalami kendala karena masih menggunakan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Oleh karena itu, penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 perlu dilakukan sinkronisasi program sesuai dengan peraturan terbaru.

Rancangan awal penyusunan RKPD Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 terdiri atas 4 program, 8 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 1.787.703.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah). Pagu indikatif tersebut merupakan pagu setelah rasionalisasi dan analisis kebutuhan akibat pandemi Covid-19, sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Kebumen

Kecamatan Poncowarno

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program Kegiatan/ sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN PONCOWARNO				1.787.703.000					1.787.703.000	
	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.787.703.000			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.787.703.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	11 dok	11.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	11 dok	11.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Poncowarno	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dok	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Poncowarno	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dok	6.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Poncowarno	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	6 dok	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Poncowarno	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	6 dok	5.000.000	

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	1.463.964.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	1.463.964.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ponco warno	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	16 orang	1.444.964.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ponco warno	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	16 orang	1.444.964.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah jenis dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	4 dok	19.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah jenis dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	4 dok	19.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	33.739.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	33.739.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4 jenis	1.750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4 jenis	1.750.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	9.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	9.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	8.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	8.000.000	

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.250.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.250.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan bahan / material	12 bulan	7.089.000	Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan bahan / material	12 bulan	7.089.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	8 orang	4.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	8 orang	4.000.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan fasilitasi arsip	12 bulan	1.650.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan fasilitasi arsip	12 bulan	1.650.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	69.750.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	69.750.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	50.750.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	50.750.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	18.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	18.000.000	

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	14 unit	42.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	14 unit	42.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kec. Ponco warno	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 unit	21.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kec. Ponco warno	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 unit	21.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin / pemeliharaan peralatan perbaikan kerja	10 unit	1.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin / pemeliharaan peralatan perbaikan kerja	10 unit	1.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 unit	20.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Kec. Ponco warno	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 unit	20.000.000	
7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan an dan pelayanan publik	100%	57.250.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Cakupan penyelenggaraan an pemerintahan dan pelayanan publik	100%	57.250.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	6 jenis	57.250.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg Dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	5 jenis	57.250.000	

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Ponco warno	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	5 jenis	57.250.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Ponco warno	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	5 jenis	57.250.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan ter selenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	21.750.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan ter selenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	21.750.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	2 keg	21.750.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	2 keg	21.750.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Ponco warno	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	2 keg	21.750.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kec. Ponco warno	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	2 keg	21.750.000	

7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	88.250.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	88.250.000	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		Jumlah kegiatan fasilitasii rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	6 keg	88.250.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		Jumlah kegiatan fasilitasii rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	6 keg	88.250.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pen dayagunaan aset desa	11 desa	16.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pen dayagunaan aset desa	11 desa	16.000.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dok	7.500.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dok	7.500.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ponco warno	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentra man dan ketertiban umum	1 kali	9.750.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ponco warno	Jumlah fasilitasi penyelenggara an ketentra man dan ketertiban umum	1 kali	9.750.000	

7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Ponco warno	Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	2 keg	20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Ponco warno	Jumlah fasilitasi kegiatan Musren bangdes dan Musrenbangcam	2 keg	20.000.000	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (pembinaan BUMDes, UKS, PKK dan Sosmasy)	4 keg	30.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Ponco warno	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (pembinaan BUMDes, UKS, PKK dan Sosmasy)	4 keg	30.000.000	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Ponco warno	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes dan Sembako)	2 keg	5.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Ponco warno	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes dan Sembako)	2 keg	5.000.000	

Hasil analisa review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, tidak mengalami perubahan mengingat pagu anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Poncowarno menyesuaikan pemberian dari dana pusat.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2021. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir usulan kebutuhan masyarakat. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Poncowarno:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kabupaten Kebumen
(Usulan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 sebagai Usulan Dana Afirmasi
Pengembangan Agrobisnis Terpadu Tahun 2022)

Kecamatan Poncowarno

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Kecamatan Poncowarno				
1.	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Desa Blater dan Desa Kedungdowo	Terfasilitasinya kelompok pembudidaya ikan di Kec. Poncowarno dalam rangka pengembangan kawasan perikanan	611.300.000	

Tabel 2.8
Daftar Usulan Prioritas Desa yang Akan Diusulkan ke Perangkat Daerah
Kecamatan Poncowarno Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Tegalrejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Desa Soka	Demplot area tanaman padi	246.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Desa Kebapangan	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
4.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Tirtomoyo	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Desa Poncowarno	Pengadaan cultivator	95.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
6.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Desa Jembangan	Pengadaan pompa air 6 inc	108.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
7.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Desa Blater	Terbangunnya saluran irigasi tingkat usaha tani	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
8.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Karangtengah	Terbangunnya jalan menuju area pertanian	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan

9.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Desa Jatipurus	Pengadaan traktor rotari	150.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
10.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Lerep Kebumen	Terbangunnya jalan usaha tani	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
11.	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Desa Kedungdowo	Terfasilitasinya program ketahanan pangan masyarakat	45.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Visi dan misi Kecamatan Poncowarno berpedoman dan sinkron dengan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2021-2026. Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah: “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati serta hasil analisa isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dapat diuraikan bahwa isi-isu strategis yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Poncowarno adalah: “Belum optimalnya implementasi *Clean and Good Governance*.”

Semua program dan kegiatan di Kecamatan Poncowarno dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pegawai adalah sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen dan berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program dan kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Poncowarno yang mandiri, sejahtera, dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Poncowarno adalah Misi 1 (satu), yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov dan open gov*” yang berintegrasi dengan program-program unggulan yang meliputi :

1. GO-LAK, Jemput ke rumah layanan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan jemput bola ke rumah “ora antri, ora suwe, cepet dadi”.
2. Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP)
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan diantaranya pelayanan non perijinan yaitu : layanan pembuatan KTP elektronik, layanan Kartu Keluarga, layanan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan, layanan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan, layanan akta kelahiran, layanan legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), layanan rekomendasi/ dispensasi surat nikah, dan layanan rekomendasi keterangan ahli waris.
3. Festival Anggaran
Festival anggaran merupakan bentuk komitmen peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dimana pelaksanaan fungsi pengawasan bersama-sama dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Melalui Festival Anggaran pemerintah Kabupaten Kebumen mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran Kecamatan Poncowarno mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang tersaji pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Poncowarno

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Tahun Ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (<i>clean and good governance</i>)		Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
2.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks	84,14	83,28	91,97	86,00	87,00	88,00	89,00	94,46

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen 2021 - 2026

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan tersebut juga merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut:

- 1) Transparansi informasi melalui media elektronik dituntut harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 2) Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
- 3) Kepemimpinan berjalan efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal;
- 4) Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
- 5) Masyarakat terlibat dalam pemberdayaan melalui kegiatan perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa dan program kegiatan pembangunan melalui padat karya terpadu.

b. Pencapaian SDG's

Dengan melaksanakan sosialisasi kepada desa/ lembaga untuk peserta rapat/kegiatan melibatkan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Di Kecamatan Poncowarno sudah melaksanakan di setiap rapat/ kegiatan.

c. Pengentasan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Poncowarno. Pada Tahun 2021, Kecamatan Poncowarno merencanakan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Strategi dalam pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibagi menjadi dua bagian, pertama melindungi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi dan upaya tersebut selanjutnya dituangkan dalam beberapa program yang diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan

bahan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Upaya pemerintah memiliki beberapa sistem yaitu perlindungan sosial, identifikasi dan penilaian penerima manfaat melalui program data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan dalam mengurangi dampak sosial ekonomi di masa pandemi, program keluarga harapan (PKH), memperluas cakupan program sembako serta menyalurkan program bantuan tunai maupun BLT yang bersumber dari Dana Desa.

d. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2021, Kecamatan Poncowarno mengusung program koordinasi tingkat kecamatan dengan kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Poncowarno.

Kecamatan Poncowarno memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumberdaya wisata alam yang tersebar di seluruh sudut wilayah (contohnya Jembatan Wisata Air, Kedungdowo Adventure Park, Wisata Alam Prabu dll). Industri kecil di wilayah Kecamatan Poncowarno antara lain manisan salak, jenang salak, sambal salak, sriping singkong, sriping talas, opak singkong, dll. Bila seluruh sumber daya ini mampu dikelola secara maksimal maka niscaya akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di Poncowarno dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

e. Prioritas APBDes Tahun Anggaran 2021.

Melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk pencapaian SDG's Desa yang mengukur seluruh aspek pembangunan, sehingga mampu mewujudkan perkembangan manusia seutuhnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kecamatan Poncowarno Tahun Anggaran 2021 untuk seluruh desa telah menganggarkan untuk anggaran SDG's.

f. Pendayagunaan BUMDes. Di Kecamatan Poncowarno, terdapat 3 (tiga) Badan Usaha Milik Desa yang sudah mulai berkembang usahanya, yakni 1) BUMDes tegalrejo dengan bentuk usahanya perbengkelan 1) BUMDes Tegalrejo dengan bentuk usahanya perbengkelan, kios pertanian dan pengelolaan pasar desa; 2) BUMDes Tirtomoyo dengan bentuk usaha pengelola Wisata Alam Prabu (WAP) dan pengelola air minum isi ulang Prabu; dan 3) BUMDes Poncowarno dengan bentuk usaha pengelola Pertashop dan percetakan.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 adalah 4 (empat) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan didalamnya.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Poncowarno sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Poncowarno, yang meliputi semua desa yang ada di Kecamatan Poncowarno dan juga Kantor Kecamatan Poncowarno sendiri, serta beberapa lokasi luar daerah serta di wilayah Kabupaten Kebumen.

c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.787.703,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam penyusunan Renja PD Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 memperhatikan penganggaran terhadap dampak Covid-19 di Kabupaten Kebumen, yang mana sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026. Setelah dilakukan pemetaan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022, terdapat 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan serta 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, dengan uraian yang ditunjukkan pada 3.10.

Tabel 3.10
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Poncowarno
Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Pencapaian IKM Kecamatan Poncowarno sesuai Perda RPJMD, dan Rancangan Akhir Renstra 2021–2026 tertuang pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
IKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	indeks	83,73	87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen 2021- 2026, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu, untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Kebumen ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dapat ditelaah dari Misi ke-1 (satu) yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi”.

A. Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Prioritas pendanaan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 memperhatikan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026, Capaian RKPD Tahun 2020 dan mengakomodir beberapa isu strategis yang dapat dicapai. Penganggaran terhadap usaha pemulihan sebagai dampak Covid-19 di Tahun 2022 juga dilakukan dalam perencanaan RKPD 2022.

Rencana kerja dan kegiatan prioritas Kecamatan Poncowarno yang mendukung prioritas Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Ket.
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.620.453.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.463.964.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.739.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.750.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.250.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	57.250.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.750.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.750.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	88.250.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88.250.000	
	JUMLAH PAGU	1.787.703.000	

B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, data tabel 4.13 sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
serta Prakiraan Maju Kecamatan Poncowarno Tahun 2022**

Nama OPD : Kecamatan Poncowarno

lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu ndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					UNSUR KEWILAYAHAN			1.787.703.000				1.892.395.000
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.620.453.000				1.727.645.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	11.000.000			11 dokumen	11.000.000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026)	Kec. Ponco warno 5 dokumen	6.000.000	DAU		5 dokumen	6.000.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJiP, SPIP, LPPD)	Kec. Ponco warno 6 dokumen	5.000.000	DAU		6 dokumen	5.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	1.463.964.000			12 bulan	1.543.506.000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kec. Ponco warno 16 orang	1.444.964.000	DAU		16 orang	1.524.506.000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi	Kec. Ponco warno 4 jenis	19.000.000	DAU		4 jenis	19.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu ndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Keuangan SKPD	keuangan SKPD yang tersusun (GU, TU, UP/LS)							
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah		12 bulan	33.739.000			12 bulan	33.739.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (kabel, lampu, terminal, saklar)	Kec. Ponco warno	4 jenis	1.750.000	DAU		12 bulan	1.750.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Kec. Ponco warno	12 bulan	9.000.000	DAU		12 bulan	9.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Ponco warno	12 bulan	8.000.000	DAU		12 bulan	8.000.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Ponco warno	12 bulan	2.250.000	DAU		12 bulan	2.250.000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	Kec. Ponco warno	12 bulan	7.089.000	DAU		12 bulan	8.089.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kec. Ponco warno	8 orang	4.000.000	DAU		8 orang	4.000.000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip	Kec. Ponco warno	12 bulan	1.650.000	DAU		12 bulan	1.650.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa	Jumlah bulan		12 bulan	69.750.000			12 bulan	62.400.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu ndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Ponco warno	12 bulan	1.000.000	DAU		12 bulan	1.650.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Ponco warno	12 bulan	50.750.000	DAU		12 bulan	42.750.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Ponco warno	12 bulan	18.000.000	DAU		12 bulan	18.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		24 unit	42.000.000			24 unit	76.000.000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kec. Ponco warno	12 unit	21.000.000	DAU		12 unit	24.000.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Kec. Ponco warno	10 unit	1.000.000	DAU		10 unit	2.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kec. Ponco warno	2 unit	20.000.000	DAU		2 unit	50.000.000
7	01	02			Program Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan		85,50%	57.250.000			85,50%	54.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu ndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan							
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		5 jenis	57.250.000			5 jenis	54.750.000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	Kec. Ponco warno	5 jenis	57.250.000	DAU		5 jenis	54.750.000
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan		100%	21.750.000			100%	21.750.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		2 kegiatan	21.750.000			2 kegiatan	21.750.000
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kec. Ponco warno	2 kegiatan	21.750.000	DAU		2 kegiatan	21.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu ndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Indonesia							
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri	24,05%	88.250.000			24,05%	88.250.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6 kegiatan	88.250.000			6 kegiatan	88.250.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Ponco warno 11 desa	16.000.000	DAU		11 desa	16.000.000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pemilihan kepala desa	Kec. Ponco warno 0	0	DAU		0	0
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kec. Ponco warno 0 kegiatan	0	DAU		0 kegiatan	0
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Ponco warno 2 dokumen	7.500.000	DAU		2 dokumen	7.500.000
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kec. Ponco warno 1 kali	9.750.000	DAU		1 kali	9.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu ndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	Kec. Ponco warno	2 kegiatan	20.000.000	DAU		2 kegiatan	20.000.000
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (BUMDes, UKS, PKK, Sosmasy)	Kec. Ponco warno	4 kegiatan	30.000.000	DAU		4 kegiatan	30.000.000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes dan Sembako)	Kec. Ponco warno	2 kegiatan	5.000.000	DAU		2 kegiatan	5.000.000
TOTAL									1.787.703.000				1.892.395.000

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan **ditahun pertama** yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 – 2026. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematis/rasional, produktif, bekerja efisien dan efektif.

Renja PD Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 memiliki kedudukan strategis yang menghubungkan antara perencanaan di Kecamatan Poncowarno dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022, serta keterkaitan dengan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Kemudian, Renja PD Kecamatan Poncowarno ini akan digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Poncowarno pada Tahun 2022.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno pada Tahun 2022, antara lain (a) dampak pandemi Covid-19 terhadap semua sektor yang terpengaruh, (b) peningkatan kesejahteraan masyarakat Poncowarno, (c) peningkatan dalam proses pelayanan di kecamatan dan desa, (d) pembinaan kepada perangkat desa, (e) implementasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran, (f) mengoptimalkan monitoring dan evaluasi, dan (g) pemutakhiran IDM berbasis SDG's. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan supaya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal. Apabila ketersediaan anggaran tidak tercukupi, program dan kegiatan tersebut akan dianggarkan kembali pada Renja PD tahun berikutnya.

Renja Kecamatan Poncowarno selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Poncowarno. Selanjutnya Renja juga memberikan umpan balik (*feed back*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.


b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

- 1) Kecamatan Poncowarno berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 dan diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
- 2) Kecamatan Poncowarno berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022.
- 3) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendPoncowarno dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.

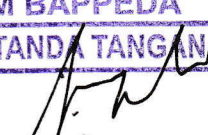
c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 ditetapkan 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan sesuai dengan program yang dilaksanakan dengan APBD Tahun 2021. Rencana ini merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Semoga keberadaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Poncowarno serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 10 September 2021
CAMAT PONCOWARNO,

Drs. ANTON PURWANTO
Pembina Tingkat I

NIP. 19751024 199602 1 002

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Tan k h-a	
Hantari Mahadewi, SP	